

KLIPING BERITA MEDIA MASSA



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

| No | Media | Tanggal | News Title | Resume |
|----|-------------------------|-------------------------|---|---|
| 1 | Bisnis Indonesia, Hal 8 | Kamis, 21 November 2019 | Investor Sulit Masuk Kalimantan Timur | Banyak investor yang ingin menanamkan modal ke Kaltim sebagai calon ibu kota negara (IKN) belum dibarengi dengan upaya penyederhanaan perizinan usaha |
| 2 | Bisnis Indonesia, Hal 7 | Kamis, 21 November 2019 | Kantor Ditjen Bakal Menyebarkan Seluruh RI | Badan Perencana Pembangunan Nasional merincikan rancangan baru berbentuk multi pada pemindahan ibu kota yang akan menyebarkan seluruh kantor direktorat ke seluruh Indonesia. Sebagai contoh untuk kantor direktorat jenderal pertambangan bi di Papua, dirjen perkebunan di Sumatera |
| 3 | Koran Tempo, Hal 3-5 | Kamis, 21 November 2019 | Pemerintah Upayakan Efisiensi Pemindahan Ibu Kota | Bappenas akan menyisir instansi yang pindah ke Kaltim. Presiden memberi masukan agar 260 eselon ! di sebar ke daerah paling berpotensi |
| 4 | Bisnis Indonesia, Hal 7 | Jumat, 22 November 2019 | Sumut Kebut Masterplan Mebidangro | Pemprov Sumut mempercepat masterplan atau rencana induk proyek pengembangan jaringan jalan di Mebidangro. Oleh karena itu rencana proyek ini ditarget rampung akhir tahun ini |
| 5 | Bisnis Indonesia, Hal 8 | Jumat, 22 November 2019 | Opini | Infrastruktur dan Sila Kelima Pancasila |
| 6 | Kotan Tempo, Hal 2 | Jumat, 22 November 2019 | Empat Proyek Jalan Tol Ditawarkan ke Investor | Kementerian PUPR kembali menawarkan proyek pembangunan jalan tol baru kepada calon investor senilai Rp 112,9 triliun |
| 7 | Kotan Tempo, Hal 3 | Jumat, 22 November 2019 | Swasta Ditawari Garap Proyek Ibu Kota Negara | Pemerintah bakal memperkuat keterlibatan swasta dalam tahap lanjutan penyiapan IKN baru di Kalimantan Timur |

| | | | |
|--------|---|---------|-------------------------|
| Judul | Investor Sulit Masuk Kalimantan Timur | Tanggal | Kamis, 21 November 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia, Hal 8 | | |
| Resume | Banyak investor yang ingin menanamkan modal ke Kaltim sebagai calon ibu kota negara (IKN) belum dibarengi dengan upaya penyederhanaan perizinan usaha | | |

► **RENCANA PINDAH IBU KOTA**

Investor Sulit Masuk Kalimantan Timur

Bisnis, BALIKPAPAN — Banyaknya investor yang hendak menanamkan modalnya ke Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara (IKN) belum dibarengi dengan upaya penyederhanaan perizinan usaha.

Anitana W. Puspa
anitana.puspa@bisnis.com

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan, momentum pembangunan IKN merupakan hal yang menguntungkan bagi Kaltim. Hanya saja, ungkap dia, persoalan regulasi perizinan untuk usaha masih sulit.

Kondisi tersebut tercermin dari belum banyak investor asing yang masuk, seperti yang terjadi di kawasan industri Karingau. Selain itu, ada juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang sampai saat ini masih belum terlihat perkembangannya.

"Nyatanya masih banyak yang mengeluh terhadap iklim investasi di Kaltim. Menarik investor asing ini tidak susah. Buka pintu perizinan, seperti Vietnam. Saat ini perusahaan kelas dunia sudah banyak yang masuk. Bahkan, pabrik Samsung menaruh investasi di sana. Kenapa, karena bagi investor asing menanamkan modal disana sangat

mudah," jelasnya, Rabu (20/11).

Dia menjelaskan, Pemprov Kaltim harus mulai meringankan dan membantu pengurusan perizinan. Selain itu juga dalam hal pungutan pajak dan hal lain yang membangun.

Senada, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur Tutuk Cahyono mengemukakan dampak positif IKN salah satunya akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kaltim.

Hal ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing Kaltim sebagai tempat investasi yang berkualitas untuk mendiversifikasi dan menghilirisasikan produk unggulan Kaltim yang bernilai tambah tinggi. "Hal ini pada gilirannya harus mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor dari Kaltim."

Di samping ekspor barang, Kaltim berpotensi besar meningkatkan ekspor jasa, terutama jasa pariwisata berbasis alam dan budaya. Tutuk berpendapat IKN adalah momentum mendorong pariwisata yang selama ini sering mengalami hambatan terkait infrastruktur.

PROMOSI WILAYAH

Gubernur Kaltim Isran Noor, menjelaskan penunjukan Kaltim sebagai IKN, menjadi salah satu poin penting untuk mempromosikan wilayah.

Isran yang baru saja menjadi pembicara di acara World Bank di Singapura meyakini dampak besar yang akan terjadi terhadap pembangunan Kalimantan Timur pasca penetapan ini.

"Berdasarkan hasil analisis berbagai pihak, penunjukan Kaltim sebagai ibu kota negara diyakini membawa dampak

positif bagi pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kaltim diprediksi meningkat, terutama didorong oleh investasi dan konsumsi," jelasnya.

Pada analisis awalnya, setiap tambahan investasi sebesar 1% akan meningkatkan pembangunan ekonomi Kaltim sebesar 0,15%. Selanjutnya, dalam jangka menengah dan panjang, pembangunan ekonomi Kaltim akan menjadi stabil dengan dukungan dari sektor konstruksi, jasa, dan manufaktur.

Hal penting lainnya, struktur ekonomi Kalimantan Timur akan menjadi lebih seimbang dengan percepatan dari industri pengolahan dan jasa untuk mendukung kebutuhan ibu kota negara. Kaltim juga telah menyiapkan delapan kawasan strategis provinsi untuk menopang rencana itu.

Keuntungan lain bagi Kaltim dari rencana relokasi ibu kota ini adalah peningkatan kesempatan kerja, di mana Pemprov Kaltim akan mendorong dan memfasilitasi masyarakat Kaltim untuk memanfaatkan peluang-peluang ini.

"Saya juga yakin angka kemiskinan akan berkurang menyusul bertambahnya perhatian terhadap pendanaan untuk pengentasan kemiskinan," imbuhnya.

Selain itu, Malaysia juga menyatakan ingin melihat peluang kerjasama di bidang investasi, perdagangan, pendidikan, industri dan pariwisata.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Tuan Yang Terutama Datuk Zainal Abidin Bakar mengatakan segera mengirimkan salah satu delegasi untuk menindaklanjuti lebih jauh, termasuk kajian potensi investasi yang kerjasama antar kedua belah pihak.

"Kami ingin melihat tapak ibu kota negara baru Indonesia di Kaltim. Kalau diizinkan," ungkapnya awal pekan ini.

Dia mengakui Negeri Jiran melihat perkembangan ekonomi yang pesat di Kaltim, terlebih jika IKN benar terwujud. 📌

► **Pemprov Kaltim harus mulai meringankan dan membantu pengurusan perizinan.**

► **Dampak positif IKN salah satunya akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.**

► **Kaltim berpotensi besar meningkatkan ekspor jasa, terutama jasa pariwisata berbasis alam dan budaya.**

| | | | |
|--------|---|---------|-------------------------|
| Judul | Kantor Ditjen Bakal Menyebar Seluruh RI | Tanggal | Kamis, 21 November 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia, Hal 7 | | |
| Resume | Badan Perencana Pembangunan Nasional merincikan rancangan baru berbentuk multi pola pemindahan ibu kota yang akan menyebarkan seluruh kantor direktorat ke seluruh Indonesia. Sebagai contoh untuk kantor direktorat jenderal pertambangan bi di Papua, dirjen perkebunan di Sumatera | | |

► KONSEP IBU KOTA NEGARA

Kantor Ditjen Bakal Menyebar Seluruh RI

Bisnis, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memerincikan rancangan baru berbentuk multi pola pemindahan ibu kota yang akan menyebarkan seluruh kantor direktorat ke seluruh Indonesia.

Oleh FX Lani & Rizki Wulandari
indonesia@bisnis.com

Menjeri PPN/Kepala Bappenas Suharsa Monoarfa mengatakan untuk bisa membuka sentra ekonomi baru, kegiatan pemindahan rencananya tidak akan fokus di wilayah Kalimantan Timur saja. Dia menyebut, ada rencana untuk menyebarkan kantor setaraf direktorat jenderal ke seluruh Indonesia.

Sebagai contoh, untuk kantor direktorat jenderal pertambangan bisa ditempatkan di Provinsi Papua. Untuk direktorat jenderal perkebunan bisa ditempatkan di Pulau Sumatra, misalnya di Provinsi Bengkulu. Contoh lain, direktorat jenderal sektor pertanian dan perikanan bisa berkarut di Provinsi Gorontalo atau di Provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa opsi lain, lanjut Suharsa, Ditjen Perumahan bisa di Provinsi NTT, Perikanan di Provinsi Maluku, sektor energi di Provinsi Kalimantan Timur, Ditjen Kehutanan di Kalimantan Tengah. Sementara di Jakarta, akan menjelma menjadi daerah berbasis industri jasa.

Adapun kantor kementerian akan tetap berada di ibu kota negara. Nantinya, untuk menghubungkan kerja lintas sentra ini, pemerintah akan mengoptimalkan penerbitan langsung untuk keterhubungan dirjen dengan kementerian/daerah dan teknologi tol larut sebagai jaringan internet yang memudahkan pegawai aparatur sipil negara bekerja di manapun.

"Karena ke depan rantai pengambilan keputusan pemerintahan hanya eselon I dan eselon II. Untuk memutuskan rantai ini maka sisanya bisa disebarkan ke daerah. Bekerjanya bisa menggunakan *covering space*, atau belerjanya di luar kamar," jelas Suharsa di Kantor DPPD, Rabu (20/11).

Dia menyatakan, rancangan Ibu kota negara tengah melalui beberapa proses. Pertama, adalah uji konsep/plan atau

pra feasibility studies yang dikerjakan oleh konsultan McKinsey dan selesai pada akhir Desember 2019.

Setelah itu, akhir tahun ini juga Suharsa menargetkan Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota Negara sudah resmi berdiri sesuai Peraturan Presiden. Adapun tujuan Badan Otorita Pemindahan IKN ini bertugas untuk menatahkan persiapan perencanaan dan pembangunan.

Nantinya, tugas dan fungsi Badan Otorita Pemindahan IKN akan berkurang dan selesai setelah fondasi hukum dasar hukum IKN berupa Undang-Undang (UU) diterbitkan. Oleh sebab itu, Suharsa berharap UU terkait Pemindahan IKN juga bisa diterbitkan sebelum target pembangunan yang akan dimulai awal 2021.

Suharsa menjelaskan pembiayaan pemindahan IKN yang sekitar Rp466 triliun, hanya akan menggunakan APBN sekitar Rp84,9 triliun. Sumber pembiayaan lain yang akan dioptimasi adalah melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUB). Salah satu cara tersebut yang akan dikerjakan adalah dengan penyewaan aset milik pemerintah di DKI Jakarta.

Dia memercini, nilai Barang Milik Negara atau aset yang tercatat milik pemerintah adalah senilai Rp1.023 triliun. Total aset itu adalah sekitar 4 juta meter persegi. Untuk menjual dana yang berkelebihan, Suharsa merencanakan skema KPBUB pengelolaan aset hanya sebatas sewa ruang saja.

"Konsepnya tidak dijual, hanya disewakan," sambungnya. Guna mendaklengiti rencana pengelolaan aset itu, Suharsa mengaku masih memantapkan Undang-Undang baru. Pasalnya, beleid yang ada dari UU Kekayaan Negara dan peraturan Kementerian Keuangan belum secara terperinci mengakomodasi soal pengelolaan aset ini.

"Belum ada UU ini menggunakan kekayaan negara untuk itu. Jadi harus UU, kalau UU harus disiapkan UU mengenai pemanfaatan kerja sama atas kekayaan negara," jelasnya.

DESAIN PEMBANGUNAN

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyelesaian



Tekah Balikpapan menjadi pintu masuk ibu kota negara Perumahan Paser Utara melalui jalur laut dengan lebar mulai 5-7 km.

Ibu Kota Baru Berbasis Forest City

Pemerintah sudah merencanakan pemindahan ibu kota baru yang lokasinya dipastikan di Kalimantan. Proses pembangunan ibu kota baru yang berbasis Forest City tersebut sudah tiga tahapan dengan periode 2021 hingga 2045.



desain pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur pada semester kedua 2020.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan aspek desain dan regulasi menjadi dua prioritas utama dalam rencana pemindahan ibu kota

negara ke Kalimantan Timur. Dia menekankan, pelaksanaan pembangunan maupun pemindahan ibu kota negara akan berjalan setelah aspek regulasi tuntas.

"Sebelum ada [aspek] legal gak mungkin [dibangun]. Kami akan selesaikan desain and build pada semester kedua 2020 dan mudah-mudahan bisa groundbreaking," jelasnya usai rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (20/11).

Untuk diketahui, saat ini status ibu kota negara masih disandang DKI Jakarta berdasarkan Undang-undang No.29 Tahun 2007. Maka, rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sekaligus bakal mengubah undang-undang tersebut.

Danis menambahkan bahwa skema pembiayaan di luar anggaran pemerintah tengah digodok dan akan merujuk pada regulasi baru yang juga tengah disusun. Secara umum, di

samping pembiayaan dari anggaran negara, biaya pembangunan IKN juga akan menggunakan skema KPBUB dan investasi langsung.

"Bisa *direct investment*. Itu dimungkinkan. Kami sudah bag-bagi mana yang kemungkinan pakai *government spending*, mana yang bisa KPBUB," katanya.

Dia menambahkan, pembiayaan dari anggaran negara diproyeksi hanya 19% dari ketumuhan investasi. Selebihnya, pemerintah berharap partisipasi badan usaha baik dalam bentuk kerja sama maupun investasi langsung.

Secara khusus, Kementerian PUPR menaksir kebutuhan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dalam pembangunan IKN mencapai Rp256 triliun. Jumlah itu dibutuhkan untuk pembangunan sumber daya air (Rp9,98 triliun), jalan dan jembatan (Rp5,5 triliun), permukiman (Rp24,83 triliun), dan perumahan (Rp215,4 triliun).

Menjeri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penetapan lokasi pembangunan istana kepresidenan sudah melalui beragam kajian. Dia mengimbau, lokasi istana presiden di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, juga tidak berada di area pertambangan batu bara.

"Kita-kira di situ kawasannya [Sepaku]. Sesuai dengan penelitian kami dengan Bappenas, yang mengandung batu bara bukan di situ, tetapi di sebelah Timur," jelas Basuki.

Untuk diketahui, istana kepresidenan merupakan bangunan khusus dalam rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Selain istana kepresidenan bangunan khusus juga mencakup istana wakil presiden, kompleks parlemen, dan kamar kementerian/lembaga. ■

► Pemerintah bakal menggunakan skema omnibus law dalam merumuskan regulasi terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

Pembangunan Transportasi di Ibu Kota Baru
26

| | | | |
|--------|--|---------|-------------------------|
| Judul | Pemerintah Upayakan Efisiensi Pemindahan Ibu Kota | Tanggal | Kamis, 21 November 2019 |
| Media | Koran Tempo, Hal 3-5 | | |
| Resume | Bappenas akan menyisir instansi yang pindah ke Kaltim. Presiden memberi masukan agar 260 eselon ! di sebar ke daerah paling berpotensi | | |

EKONOMI DAN BISNIS

Pemerintah Upayakan Efisiensi Pemindahan Ibu Kota

Pembahasan omnibus law akan segera digelar dalam rapat selanjutnya.

EDISI, 21 NOVEMBER 2019



Kabupaten Penajam Paser Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur, 28 Agustus lalu.

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah mengupayakan efisiensi dalam proses pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Caranya, kata dia, adalah menyisir kembali jumlah pegawai dan instansi pemerintah pusat yang hendak dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Semakin efisien, semakin hemat anggaran negara," kata Suharso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo untuk merumuskan jumlah aparat sipil negara yang akan diboyong ke ibu kota baru kelak.

Dalam skema yang dibuat sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan hampir seluruh instansi pemerintah pusat. Dari situ setidaknya ada 198 ribu aparat sipil negara yang akan diboyong ke Kalimantan Timur.

Presiden memberi masukan agar 260 eselon I, seperti direktorat jenderal dan kedeputian, disebar ke daerah lain. Maluku, kata dia, yang memiliki potensi kelautan dan perikanan, didorong untuk menjadi kandang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Papua, yang memiliki potensi pertambangan, akan memiliki Direktorat Jenderal Pertambangan.

Tak kurang dari Rp 466 triliun dibutuhkan untuk pembangunan pusat pemerintahan baru seluas 46 ribu hektare pada 2024 mendatang. Enam ribu hektare di antaranya merupakan fasilitas utama, seperti istana presiden, kompleks parlemen, kedutaan besar, dan gedung-gedung instansi pemerintah pusat. Pembangunan fasilitas utama itu membutuhkan suntikan langsung duit negara sebesar Rp 89,5 triliun atau 19,2 persen dari total kebutuhan.

Jika wacana penghematan pemindahan instansi pusat tersebut dijalankan, Bappenas menghitung akan ada penghematan penggunaan lahan dari 393,3 hektare menjadi 303 hektare. Suharso tak menampik skema ini bisa bertambah, berkurang, atau tetap pada skema awal. Badan Otorita yang segera dibentuk pada Desember nanti akan melanjutkan kajian menyeluruh soal pemindahan ini. "McKinsey sedang melakukan kajian pra-rencana induk lanjutan dari masterplan dasar kami. Akhir tahun direncanakan selesai," kata Suharso.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danish Sumadiliga, menuturkan kementerianya siap terhadap berbagai perubahan dan kebutuhan infrastruktur bangunan kelak. Lembaganya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk pengerjaan jalan, penyediaan air baku, termasuk jasa konsultasinya. "Uang muka pembangunan fisik saja sekitar Rp 865 miliar," kata Danish.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, mengatakan dibutuhkan anggaran lebih dari Rp 200 triliun untuk membangun konektivitas transportasi. Angka tersebut terbilang besar karena ada penambahan biaya spesifikasi multi-moda transportasi yang ramah lingkungan.

Angka tersebut belum termasuk keharusan pemerintah membangun bandar udara spesial untuk tamu negara penting, seperti duta besar, di ibu kota baru kelak.

Ketua Komisi Infrastruktur DPR, Lasarus, mengatakan Dewan sudah memberikan lampu hijau terhadap wacana ini. "Tapi Dewan mengingatkan pemerintah agar jangan banyak berbuat dulu sebelum undang-undang ibu kota dibuat," katanya.

Pemerintah sudah mengajukan secara resmi pembuatan undang-undang (omnibus law) yang menyelaraskan undang-undang tentang ibu kota, kepegawaian, tata ruang, perumahan, dan perubahan daerah di Kalimantan Timur.

ANDI IBNU

| | | | |
|--------|---|---------|-------------------------|
| Judul | Sumut Kebut Masterplan Mebidangro | Tanggal | Jumat, 22 November 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia, Hal 7 | | |
| Resume | Pemprov Sumut mempercepat masterplan atau rencana induk proyek pengembangan jaringan jalan di Mebidangro. Oleh karena itu rencana proyek ini ditarget rampung akhir tahun ini | | |

► PENGEMBANGAN KAWASAN

Sumut Kebut Masterplan Mebidangro

Bisnis, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mempercepat *masterplan* atau rencana induk proyek pengembangan Jaringan Jalan Metropolitan Medan, Binjai, Delisendang dan Karo atau Mebidangro. Oleh karena itu, rencana induk proyek itu ditarget rampung pada akhir tahun ini.

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan akses jalan menuju Kabupaten Karo hanya memiliki satu jalan utama. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan pengembangan kawasan terintegrasi Mebidangro.

"Infrastruktur jalan menuju ke sana hanya satu, sekali mobil ada yang mogok maka akan terjadi macet yang panjang, inilah yang segera kita atasi, selain itu agar petani kita yang ada di Karo bisa hidup makmur," kata Edy, Kamis (21/11).

Adapun rencana tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Presiden No.62/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro. Edy berharap *masterplan* jaringan jalan Mebidangro dapat diselesaikan akhir tahun, sehingga di awal 2020 bisa dilakukan *groundbreaking* untuk pengerjaan Mebidangro.

"Untuk pendanaannya nanti kita gunakan dana APBN, APBD, investor hingga dana kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," katanya.

Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rehadian menyampaikan Kementerian PUPR mendukung upaya percepatan pembangunan kawasan Mebidangro. Karena itu, pihaknya hadir untuk mensinkronkan seluruh kebutuhan konektivitas, antara setiap kabu-

paten yang memiliki kebutuhan.

"Biaya transportasi untuk daerah pertumbuhan harus bisa di tekan, kalau itu bisa kita lakukan maka ekonomi di daerah tersebut akan menjadi lebih kompetitif dan berkembang," ujar Hedy.

Dikatakannya, untuk mewujudkan konektivitas transportasi yang baik, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Bicara mengenai konektivitas jaringan jalan tersebut, perlu membahas terkait transportasi.

"Alat transportasi pun bukan hanya jalan tol, ada juga transportasi kereta api dan transportasi umum, untuk itu harus kita perhatikan wilayah mana yang punya potensi, jangan malah bersaing hingga akhirnya pertumbuhan ekonomi di daerah itu jadi mati," ucapnya.

Adapun sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sumut Hasmirizal Lubis memaparkan, agenda Mebidangro yang telah dilakukan pembangunan yakni seperti Bandara Kualanamu, Tol Medan-Binjai, Tol Kualanamu-Lubuk Pakam-Tebingtinggi.

Ditambah dengan proyek Jalan Akses Non Tol Kualanamu-Percut Sei Tuan, peningkatan *bus rapid transit* Mebidangro, pembangunan *elevated double track* kereta api lintas Medan-Kualanamu, dan pembangunan terminal perti kemas Belawan, dan peningkatan IPAL Cemara.

Hazmirizal menyebutkan, ada beberapa agenda Mebidangro yang sedang atau dalam proses pembangunan di antaranya pembangunan bendungan Lausimeme, pembangunan Jalan Tol dalam Kota Medan, peningkatan akses Medan-Berastagi. (Astoria Desi KS)

| | | | |
|--------|---|---------|-------------------------|
| Judul | Opini | Tanggal | Jumat, 22 November 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia, Hal 8 | | |
| Resume | Infrastruktur dan Sila Kelima Pancasila | | |

Infrastruktur dan Sila Kelima Pancasila

Nirwono Joga
Pusat Studi Perencanaan

PEMERINTAH berkomitmen menuntaskan Jalan Tol Trans-Sumatra (JTS) dari Lampung hingga Aceh sepanjang 2.974 kilometer (koridor utama 2.046 km, koridor pendukung 928 km) pada 2024. Komitees ini dipegang Presiden Joko Widodo saat meresmikan JTS ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 199 kilometer, Jumat (15/11).

Infrastruktur tetap akan menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun mendatang. Infrastruktur mendorong peningkatan efisiensi bisnis dan konektivitas menghubungkan sentra-sentra produksi atau kawasan industri dengan jalur distribusi sehingga mampu menekan biaya logistik.

Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir (2014-2019), memperbaiki infrastruktur Indonesia pada peringkat ke-32 atau naik 30 peringkat dari 2010. Namun, peningkatan itu masih belum cukup karena kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar.

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk memperbaiki indeks logistik, meningkatkan daya saing, dan pemerataan pembangunan. Utilitas infrastruktur harus mampu mendorong kegiatan produktif, nilai tambah perekonomian domestik, dan mengakselerasi lapangan kerja baru. Karena itu, mampu me-

tingkatkan peringkat posisi Indonesia dalam indeks daya saing global.

Keberadaan infrastruktur tol harus mampu memstimulasi perekonomian, membangkitkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, memperbaiki jaringan logistik, memberikan fasilitas untuk berbagai produk, mendorong percepatan sektor unggulan daerah, dan menciptakan lapangan kerja.

Kehadiran tol harus mampu mendorong pemerintah daerah (provinsi, kota/kabupaten) untuk lebih giat lagi dalam membangun daerah. Pemerintah daerah harus didorong untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan keberadaan tol agar mendorong perekonomian masyarakat dengan menyambungkan tol ke kawasan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Kehadiran infrastruktur tol mengakibatkan perubahan tata guna lahan dan perubahan ruang di sepanjang tol. Pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, harus segera melakukan restrukturisasi tata ruang wilayah, mengevaluasi, menyelaraskan, dan jika perlu, merevisi rencana tata ruang dan wilayah, juga menetapkan (jika belum ada) rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, rencana tata lingkungan dan lingkungan, serta panduan rancang kota/kawasan perkotaan.

Memperkuat basis perekonomian lokal

Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan pe-



ngembangan kawasan industri, pelabuhan, bandar udara, properti hunian komersial hingga destinasi wisata agar manfaat penyediaan tol maksimal. Semakin baik konektivitas antarwilayah oleh infrastruktur tol, bandar udara, dan pelabuhan, akan memperkuat basis perekonomian lokal. Hal ini menedu-

ring titik-titik ekonomi baru sehingga pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah terus bergerak.

Pemerintah daerah harus menciptakan pusat-pusat industri baru berdasarkan produk pertanian, perkebunan, atau perikanan yang kompetitif. Pemerintah bersama operator tol harus melibatkan

pemerintah daerah, pengusaha lokal dan usaha mikro kecil menengah, perguruan tinggi lokal, serta komunitas masyarakat daerah. Mereka dapat dikurseratkan dalam pengembangan tempat-tempat istirahat dan pelayanan di sepanjang tol.

Kemungkinan atau peluang baru karena tersinggunya ja-

ringan tol harus ditangkap dengan jeli dan cerdas oleh para pelaku usaha lokal. Koridor tol dapat dikembangkan menjadi kucir ekonomi. Pemerintah perlu menyusun aturan yang memungkinkan koridor tol mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

Optimalisasi kehadiran infrastruktur tol sebagai prasarana angkutan orang, barang, dan logistik ekonomi. Karena itu, pergerakan barang dari sentra produksi ke pasar menjadi lancar. Biaya logistik bisa ditekan, pemasaran produk lokal dapat ditingkatkan, dan investor luar dirarik berinvestasi ke daerah sehingga mendorong perekonomian lokal dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata.

Pengembangan ekonomi di koridor tol diharapkan dapat menjaga sekaligus mendorong roda ekonomi dalam negeri agar tetap bergerak melalui investasi di daerah-daerah. Keberadaan Trans-Jawa dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa sebagai pusat perekonomian nasional. Sementara itu, kehadiran Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi, dan Trans-Papua, kelak harus mampu mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

Infrastruktur sosial

Pembangunan infrastruktur fisik juga harus diringi pembangunan infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur sosial yang tepat akan de-

ngan cepat menurunkan jumlah orang miskin, mengatasi ketimpangan kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur sosial fokus pada pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan akses terhadap pangan.

Penyediaan pendidikan yang tepat akan membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari kemiskinan. Akses pada layanan kesehatan akan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat, seperti menurunkan angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Akses pangan sejak dini agar anak-anak mendapatkan makanan bergizi seimbang, memiliki fisik dan kecerdasan tinggi, generasi yang siap bersaing di dunia kerja, serta terhindar dari penyakit degeneratif.

Ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial yang berkualitas dapat mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, menumbuhkan ekonomi lokal yang inklusif, menghadirkan keadilan sosial masyarakat, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia, menurut Presiden Joko Widodo, ialah ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mendukung sampan pencapaian tujuan, perlu dipacu agar laju pembangunan infrastruktur sektor unggulan, agar tercapai Indonesia Maju.

| | | | |
|--------|---|---------|-------------------------|
| Judul | Swasta Ditawari Garap Proyek Ibu Kota Negara | Tanggal | Jumat, 22 November 2019 |
| Media | Kotatan Tempo, Hal 3 | | |
| Resume | Pemerintah bakal memperkuat keterlibatan swasta dalam tahap lanjutan penyiapan IKN baru di Kalimantan Timur | | |

EKONOMI DAN BISNIS

Swasta Ditawari Garap Proyek Ibu Kota Negara

Tokyo Gas berminat menyuplai gas.

EDISI, 22 NOVEMBER 2019



Pelabuhan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 28 Agustus lalu.

Biaya Jumbo Bangun Ibu Kota

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan berada di garis depan pengerjaan infrastruktur penunjang ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Kedua kementerian itu memproyeksikan biaya besar untuk membangun pusat pemerintahan, yang harus ditangani bersama swasta, baik lewat investasi murni maupun program kemitraan.

Infrastruktur Umum dan Sarana Sipil

- **Perencana:** Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- **Total kebutuhan (2020-2024):** Rp 256 triliun

TAHUN PENGGUNAAN DAN BESARAN (RP TRILIUN)



Proyeksi Biaya Pembangunan Infrastruktur (Rp triliun)

- sumber daya air: 9,88
- jalan dan jembatan: 5,5
- permukiman (termasuk sarana dan prasarana): 24,8
- perumahan (termasuk sarana dan prasarana): 215,4

JAKARTA - Pemerintah bakal memperkuat keterlibatan swasta dalam tahap lanjutan penyiapan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan infrastruktur penunjang masih akan digarap dengan kas negara. "Nanti swasta masuk untuk proyek yang memberi pengembalian investasi, seperti gas, rumah sakit, dan jalan tol," ucapnya, kemarin.

Setelah mengumumkan rencana pengalihan pusat pemerintahan di area yang mengiris Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Agustus lalu, pemerintah mulai menyiapkan persyaratan regulasi dan desain induk megaprojek itu. Dalam rapat dengan anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu lalu, Kementerian mengungkapkan kebutuhan biaya pengerjaan infrastruktur ibu kota menembus Rp 296 triliun. Jumlah yang rencananya ditanggung bersama oleh pemerintah dan swasta itu akan dipakai tahun depan hingga tahap pertama pemindahan pada 2024.

Danis membenarkan pengeluaran 2020 belum melampaui Rp 1 triliun, karena baru untuk penyusunan desain dan infrastruktur pembentuk IKN, seperti jalan arteri dan jaringan air baku. Namun, kebutuhan meningkat drastis pada 2021-2023. "Setelah ada masterplan, nanti kami akan memilah proyeknya. Nanti kami tahu yang layak untuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta, dan sebagainya," tuturnya.

Menurut dia, berbagai entitas swasta sudah menjajaki peluang proyek yang bisa dikerjakan di ibu kota baru. Namun, tawaran proyek masih akan diseleksi kementerian. "Tapi memang banyak perusahaan sedang menyurvei kira-kira bisa mengerjakan apa."

Setelah bertemu dengan delegasi Japan Indonesia Association, kemarin sore, Menteri Pekerjaan Umum Basoeki Hadimoeljono menyebut perusahaan asal Negeri Sakura itu pun berminat dengan proyek IKN. "Misalnya ada Tokyo Gas yang ingin menyuplai gas ke ibu kota," katanya. Dia menuturkan bahwa proyek yang memiliki tingkat pengembalian (internal rate of return) yang baik akan disodorkan ke swasta.

Kementerian Perhubungan ikut memetakan kebutuhan investasi untuk proyek transportasi ibu kota negara. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Awang Meindra, mengakui perencanaan di sektornya menjadi yang termahal, dengan kebutuhan Rp 209 triliun.

Perkiraan itu, kata dia, hanya untuk kereta api perkotaan, mass rapid transit rute bolak-balik Sepinggan-Buluminung-IKN-Semboja yang seluruhnya berstruktur layang, serta kereta antarkota Tanjung-Balikpapan-Samarinda. "Infrastruktur kereta memang mahal," kata Basoeki. "Tapi studi pengembangan jaringan baru dilaksanakan pada 2020."

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, tengah mengutamakan pembentukan badan otorita yang mengkoordinasi proyek IKN. "Akhir tahun ini juga kami siapkan naskah akademis Undang-Undang Ibu kota Negara," katanya di kompleks DPR, Rabu lalu.